

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pengembangan Pariwisata

1. Pengertian Strategi

Menurut Poerwadarminto¹⁶ strategi diartikan sebagai : “Suatu cara, Usaha, Akal, Ihtiar (untuk mewujudkan suatu tujuan, menyelesaikan persoalan serta mencari penyelesaian dan sebagainya). Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap entrepreneur maupun setiap manager, dalam segala macam bidang usaha. Sejak beberapa tahun yang lampau, pengertian strategi makin banyak mendapatkan perhatian dan dibahas dalam literatur tentang manajemen, aneka macam artikel bermunculan sehubungan dengan misalnya : astategi assortimen produk-srategi, pemasaran-strategi, diversifikasi-strategi bisnis. Adapun perhatian terhadap istilah strategi muncul, oleh karena orang menyadari bahwa setiap perusahaan memerlukan sebuah skope yang terumuskan dengan baik, dan arah pertumbuhan, dan bahwa sasaran-sasaran saja tidak dapat memenuhi kebutuhan demikian, sehingga dengan demikian diperlukan peraturan-peraturan keputusan adisional agar perusahaan yang bersangkutan dapat mencapai pertumbuhan teratur, serta yang menguntungkan.

¹⁶ Wardiyanto, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hlm. 9.

Mengingat bahwa istilah-istilah: strategi, sasaran, tujuan-tujuan, dan program-program memiliki arti yang berbeda-beda bagi seorang pembaca individual, atau bagi bermacam kultur keorganisasian, maka perlu disajikan beberapa buah definisi sebagai berikut. Sebuah strategi, merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok sesuatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohensif. Sebuah strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya sesuatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya, perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan, dan gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh oponent-oponent yang intelegen.

2. Pengertian Pengembangan

“Kembang” merupakan kata dasar dari istilah “ Pengembangan “. Tercantum pada kamus besar bahasa Indonesia arti dari Pengembangan yaitu “proses, cara, perbuatan mengembangkan, pemerintah selalu berusaha dalam pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kesasaran yang dikehendaki”. Sedangkan menurut kamus istilah manajemen , memberikan pengertian bahwa : “Pengembangan mempunyai arti bahwa perubahan secara bertahap dan teratur serta menjurus kesasaran yang dikehendaki, pengembangan ditandai dengan meningkatnya pertambahan hasil yang lebih besar”.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Sehingga pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan. Pada dasarnya tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi. Menurut Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 4, tujuan pengembangan pariwisata adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa

Pariwisata dipandang sebagai sumberdaya ekonomi yang potensial. Pariwisata dapat menjadi alat penarik investasi di daerah yang memiliki potensi sangat besar dan memiliki banyak keunggulan, Diantarannya :

- a. Pengembangan pariwisata merupakan hal yang dapat dilaksanakan dengan waktu yang paling cepat
- b. Pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan metode yang paling mudah dan sederhana
- c. Pengembangan pariwisata akan melibatkan masyarakat, sehingga banyak pihak dapat menikmati manfaatnya

- d. Pengembangan pariwisata tidak hanya memerlukan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi, tetapi juga berkompetensi menengah dan rendah
- e. Pengembangan pariwisata dapat mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya dan sosial masyarakat
- f. Kendala pengembangan pariwisata relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor lainnya
- g. Pengembangan pariwisata menawarkan sektor tercepat untuk membangun industri pendukung

Pengembangan pariwisata suatu daerah akan membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik maka justru akan membawa kerugian atau berdampak negatif bagi stakeholder maupun daerah tempat pariwisata berkembang.

Menurut Oka A. Yoety menyatakan bahwa ada sembilan prinsip yang perlu diikuti oleh pengembangan pariwisata sebagai pedoman dasar untuk menyusun rencana pariwisata yaitu :

- a. Perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan regional maupun nasional dari pembangunan perekonomian negara.

- b. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu menggunakan pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata.
- c. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan.
- d. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu didasarkan pada studi yang khusus dibuat secara khusus untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya disekitar wilayah pengembangan.
- e. Perencanaan fisik harus didasarkan pada penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografis yang lebih luas tidak hanya dari segi administrasi saja.
- f. Perencanaan dan penelitian yang dilakukan harus memperhatikan masalah kelestarian ekologi agar pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.
- g. Perencanaan pengembangan pariwisata harus memperhatikan dampak sosial supaya pengembangan pariwisata tidak mendapatkan resistensi karena konflik sosialn yang mungkin timbul.
- h. Pada daerah perkotaan dan daerah industri, perlu direncanakan fasilitas hiburan yang disebut *pre-urban*.
- i. Perencanaan pengembangan pariwisata salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm 11

3. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Jika dilihat dari bahasanya dan dikaji secara etimologis maka pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta menurut Yoeti¹⁸, bahwa pariwisata terdiri dari dua suku kata “pari” dan “wisata”. Pari memiliki arti banyak, berkali – kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Oleh karena itu pariwisata diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan berkali – kali dari satu tempat ketempat lainnya.

Sedangkan menurut Musanef¹⁹ menyatakan bahwa : Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk bisa bepergian kesuatau tempat guna mendapatkan suatau hiburan ataupun pengalaman yang menarik serta pengetahuan yang lebih luas. Guna memenuhi berbagai keinginan manusia yang mencakup:

- 1) Semua SDA (Sumber Daya Manusia) baik buatan manusia maupun alami dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam melakukan aktivitas perjalanan maka diperlukan kegiatan tersebut.

Dari berbagai pengertian di atas kesimpulannya adalah bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan perjalanan sementara waktu untuk memenuhi

¹⁸ Oka A, *Komersial Seni Budaya dalam Pariwisata*, (Angkasa: Bandung, 1995) Hlm. 3

¹⁹ Musanef, *Manajemen Pariwisata Indonesia*, (Toko Agung : Jakarta, 1995) Hlm. 11

berbagai macam keinginan manusia misalnya ingin mengetahui bagaimana kondisi atau keindahan alam di suatu wilayah serta informasi mengenai ekowisata.

Jadi kesimpulannya adalah istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu untuk memimpin tentara, menang perang dan mempertahankan wilayah, melindungi kota dari serbuan musuh, menghancurkan musuh. Setiap jenis tujuan memerlukan pemanfaatan sumberdaya yang berbeda. Orang Yunani mengetahui bahwa strategi lebih dari sekedar berperang dalam pertempuran. Sejak zaman Yunani kuno, konsep strategi sudah mempunyai komponen perencanaan dan pembuatan keputusan atau komponen tindakan.

Ditinjau dari perspektif manajemen, strategi adalah upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar secara keseluruhan. Karena, pada saat ini terlihat perkembangan pemakaian teknik-teknik manajemen yang sesungguhnya merupakan langkah strategi yang dilakukan sebagai respon organisasi atau institusi untuk memperbaiki cara pengelolaan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi.²⁰

²⁰ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hlm 52.

Upaya bagi institusi atau organisasi dengan membuat konsep atau kerangka berpikir manajemen strategik untuk beradaptasi kembali terhadap perubahan lingkungan, melalui pencarian faktor strategis dengan menggunakan teknik-teknik manajemen, agar organisasi dapat dipertahankan dan kinerjanya semakin optimal. kegunaan praktis yang diperoleh dari aplikais teknik-teknik yang dikembangkan manajemen strategik adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan strategi-strategi yang efektif
- 2) Memperjelas arah masa depan
- 3) Menciptakan prioritas
- 4) Membuat keputusan saat ini dengan mempertimbangkan konsekuensi masa yang akan datang
- 5) Megembangkan landasan yang kokoh bagi pembuatan keputusan
- 6) Membuat keputusan yang melampaui fungsi dan struktur yang ada
- 7) Memecahkan masalah pokok yang dihadapi
- 8) Memperbaiki kinerja institusi
- 9) Menangani kondisi lingkungan yang cepat berubah.

b. Jenis pariwisata

Menurut Oka A. Yoeti jenis pariwisata diklasifikasikan menurut letak geografis, pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, alasan atau

tujuan perjalanan, saat atau waktu berkunjung dan menurut obyeknya.

Jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :²¹

1) Menurut letak geografis di mana kegiatan pariwisata berkembang

a) Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Yaitu pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya kepariwisataan Bandung, Jakarta saja dan sebagainya.

b) Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau ruang lingkup yang lebih luas dari pariwisata lokal, misalnya kepariwisataan Sumatera Utara, Bali dan sebagainya.

c) Pariwisata Nasional (*National Tourism*)

Yaitu pariwisata yang berkembang dalam suatu negara.

d) Pariwisata regional-internasional

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah dan sebagainya.

e) Kepariwisata dunia (*international tourism*)

²¹ Diana Setiati, *Dampak keberadaan Objek Wisata Lava Tour terhadap keadaan sosial Ekonomi Masyarakat Desa Umbulharjo Cangkringan Sleman*, (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2015), hlm. 10.

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di dalamnya regional-international tourism dan national tourism.

2) Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

a) *In Tourism* atau Pariwisata Aktif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu sehingga dapat menambah devisa bagi negara yang dikunjungi dan memperkuat posisi neraca pembayaran negara.

b) *Out-going Tourism* atau Pariwisata Pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri ke luar negeri sebagai wisatawan. Hal ini akan merugikan negara asal wisatawan karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri.

3) Menurut alasan atau tujuan perjalanan

a) *Business Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, konvensi, simposium, musyawarah kerja.

b) *Vocation Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau cuti.

c) *Educational Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang-orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan.

4) Menurut saat atau waktu berkunjung

a) *Seasonal Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu.

b) *Occasional Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu even seperti sekaten di Yogyakarta, Galungan dan Kuningan di Bali dan sebagainya.

5) Menurut obyeknya

a) *Cultural Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan oleh adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah.

b) *Recuperational Tourism*

Disebut juga pariwisata kesehatan. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit seperti mandi di sumber air panas.

c) *Commercial Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, misalnya expo, fair, pameran dan sebagainya.

d) *Sport Tourism*

Yaitu perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.

e) *Political Tourism*

Yaitu suatu perjalanan yang bertujuan untuk menyaksikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan suatu negara seperti ulang tahun atau peringatan hari tertentu.

f) *Social Tourism*

Jenis pariwisata ini tidak menekankan untuk mencari keuntungan seperti studi tour, piknik dan sebagainya.

c. Daerah Tujuan Wisata

Daerah tujuan wisata atau yang sekarang ini disebut dengan destinasi wisata, merupakan daerah yang memiliki obyek-obyek wisata yang didukung prasarana pariwisata dan masyarakat, daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap

menerima kunjungan wisatawan. Untuk menjadi daerah tujuan wisata tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah antara lain:

22

- 1) Melakukan investasi obyek dan daya tarik wisata di daerahnya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata
- 2) Menyiapkan jalan-jalan menuju obyek dan daya tarik wisata
- 3) Menyiapkan masyarakat untuk menerima wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan menampilkan keramahan, rasa aman, rasa nyaman, dan bersahabat.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 5 unsur yaitu:

- 1) Obyek dan daya tarik wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah nyaman dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam

²² Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm 15-16.

bentuk atraksi kesenian, upacara adat nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

2) Prasarana pariwisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya, untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan sesuai dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

3) Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

4) Tata laksana /Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan dibawah tanah seperti:

- a) Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran.
- b) Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- c) Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata
- d) Sistem komunikasi yang mudah
- e) Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan diberbagai sektor bagi para wisatawan.
- f) Masyarakat (lingkungan)

B. Pariwisata dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makan ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam.

Sejalan dengan tujuan dijalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.²³ Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang ditujukan kepada manusia untuk memperhatikan lingkungan sekitar, orang-orang yang ada disekitar kita dalam hal kebiasaan/adatnya untuk memperhatikan segala sesuatu semata-mata untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah Al-Ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁴

Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.²⁵

Sehingga dapat di simpulkan *Islamic Tourism is all kind of Tourism, instilled with the Ethical Value of Islam, that can be served for all.* Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah

²³ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta:Republika, 2012), hlm. 55.

²⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahan* Hlm. 398

²⁵ *Ibid*, hlm. 54-55.

dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. Berikut perbandingan pariwisata syariah dengan pariwisata lainnya.

Tabel 2.1
Perbedaan Pariwisata Syariah, Konvensional dan Religi²⁶

NO	Item Perbandingan	Konvensional	Religi	Syariah
1.	Objek	Alam, budaya, heritage, kuliner	Tempat ibadah, peninggalan sejarah	Semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritual	Meningkatkan spirit religiusitas dengan cara menghibur
3.	Target Memenuhi keinginan dan kesenangan, serta menumbuhkan kesadaran akan suatu keyakinan hidup dan kelangsungan pribadi	Semata-mata hanya untuk hiburan (memuaskan nafsu kesenangan dan kepuasan)	Aspek spiritual yang bisa menyenangkan dan menentramkan jiwa	Target Memenuhi keinginan dan kesenangan, serta menumbuhkan kesadaran akan suatu keyakinan hidup dan kelangsungan pribadi
4.	Guide	Memahami dan menguasai informasi dan menjelaskannya semenarik	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata	Membuat turis tertarik terhadap objek sekaligus membangkitkan spirit

²⁶ Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan* (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm.21.

		mungkin		kesadaran hidup beretika, mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah, dijelaskan semenarik mungkin, sehingga wisatawan paham apa peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin.
5.	Fasilitas ibadah	Sekedar pelengkapan	Termasuk dalam perjalanan	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual ibadah menjadi paket hiburan
6.	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal (unsur haram tidak ada terkandung dalam kulinernya)
7.	Relasi dengan masyarakat di lingkungan objek wisata	Komplemente r dan semata-mata mengejar keuntungan	Komplemente r dan semata-mata mengejar keuntungan	Integrated, berinteraksi berdasarkan pada prinsip-prinsip

Sumber: Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan²⁷

2. Kriteria Pariwisata Syariah

²⁷ *Ibid*, hlm 56

Kriteria umum pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, yaitu:²⁸

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum,
- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan,
- c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat,
- d. Menghindari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi, menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila,
- e. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan,
- f. Bersifat universal dan inklusif,
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, dan
- h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Jika kriteria umum di atas diaplikasikan pada komponen usaha, profesi, dan daya tarik wisata maka dari panduan umum menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Daya Tarik/Objek Wisata Syariah

Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
- 2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci

²⁸ *Ibid*, hlm 57-58

- 3) Tersedia makanan dan minuman halal
- 4) Pertunjukan seni budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

b. Akomodasi Pariwisata Syariah

Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
- 2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
- 3) Tersedia makanan dan minuman halal
- 4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

c. Usaha penyedia makanan dan minuman

Seluruh restoran, kafe, dan jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku, dan proses memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran, kafe, maupun jasa boga

tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kalau cara tersebut belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat halal MUI
- 2) Ada jaminan halal dari MUI setempat, Tokoh muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya, apabila poin belum terpenuhi
- 3) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

d. Spa, sauna, dan massage

Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata syariah ini, di antaranya:

- 1) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk wanita
- 2) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi
- 3) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya
- 4) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.

e. Biro perjalanan wisata syariah

Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualitas syariah. Namun yang penting biro perjalanan tersebut:

- 1) Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah,

- 2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah,
- 3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.

f. Pramuwisata (pemandu wisata) syariah

Pramuwisata syariah memegang peran sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata, karena ditangannyalah eksekusi berbagai aturan syariah yang diterapkan dalam pariwisata syariah. Karena posisinya sebagai pemimpin perjalanan wisata, keimanan seorang pramuwisata haruslah seorang muslim atau muslimah. Di samping itu ia harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Mendalami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
- 2) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab
- 3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam
- 4) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.

Menurut fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata terkait ketentuan destinasi wisata :²⁹

- a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :

²⁹ Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI(X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata.

- 1) Mewujudkan kemaslahatan umum
 - 2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan
 - 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
 - 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
 - 6) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
- b. Destinasi wisata wajib memiliki:
- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- 1) Kemusyrikan dan khurafat
 - 2) Maksiat, zina, porografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
 - 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip syariah.

C. Konsep Manajemen Dalam Pengembangan Pariwisata

Istilah manajemen sering diidentikkan dengan istilah pengelolaan. Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama

yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo dalam artikel Putra memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan dunia pariwisata yang sudah berkembang menjadi suatu bentuk industri yang kompleks, maka diperlukan suatu pola – pola tertentu dalam mengembangkan sector pariwisata tersebut, agar pariwisata dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi salah sector andalan dalam rangka peningkatan sumber keuangan bagi daerah maupun Negara. Dimana dalam pola pengembangan sector pariwisata ini perlu dilakukan dengan mempergunakan konsep – konsep manajemen pariwisata dan pemasaran yang modern. Karena di era zaman sekarang perusahaan – perusahaan pada saat ini tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kejelian dan intuisi. Hal ini dikarenakan adanya tekanan lingkungan dan kelembagaan yang beraneka ragam.

Pada dasarnya manajemen pariwisata mencakup lima unsure pokok yang dapat dipakai sebagai pola pengembangan bagi sector pariwisata. Menurut Wahab kelima unsure pokok tersebut adalah pengorganisasian, perencanaan, motivasi, pemetaan personil dan koordinasi. Manajemen

pariwisata tidak terlepas dari dua konsep yaitu: konsep manajemen dan konsep pariwisata. Kedua konsep tersebut sangat berhubungan, karena dalam manajemen pariwisata selain memerlukan sarana dan prinsip-prinsip manajemen, pada manajemen pariwisata memerlukan aspek potensi yang dimiliki oleh objek wisata tersebut sebagai input awal penawaran wisata agar dapat dilakukan proses manajemen. Ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. *Attraction* (daya tarik)

Dimana daerah tujuan wisata dalam menarik wisatawan hendaknya memiliki daya tarik baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya .

2. *Accesable* (bisa dicapai).

Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata

3. Fasilitas (*Amenities*)

Syarat yang ketiga ini memang menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata (DTW) dimana wisatawan dapat dengan nyaman tinggal lebih lama di daerah tersebut.

4. Adanya Lembaga Pariwisata (*Ancillary*)

Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan (*Protection of Tourism*) dan terlindungi baik

melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung / Orang berpergian.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan aspek penawaran sangat dibutuhkan dalam manajemen pariwisata. Aspek tersebut erat kaitannya dengan manajemen objek wisata, objek wisata yang akan dikelola harus memiliki potensi yang dapat dilihat dari terpenuhinya aspek-aspek tersebut.

D. Fungsi Dan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pariwisata

Otonomi daerah dilaksanakan dengan difokuskan pada daerah kabupaten atau kota serta dilaksanakannya berdasarkan asas desentralisasi maka setiap pemerintah daerah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam memanfaatkan potensi daerahnya.

Adapun peranan atau dinamisasi dari pemerintah daerah adalah sebagai unsure pembaharu dan pendorong pembangunan dan juga pengembangan kepariwisataan serta pembangunan nasional. Supaya dapat menjalankan perannya dengan maksimal oleh karena itu perlu suatu dukungan dan kerjasama dengan organisasi lainnya misalnya Dinas Pariwisata Daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah dalam pengembangan sector pariwisata memiliki peran yang penting yaitu sanggup menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas serta melakukan kerjasama atau koordinasi antar aparat pemerintah dengan pihak – pihak yang terkait di dalamnya penataan serta promosi ke luar negeri atau ke daerah lainnya, serta melakukan pembinaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan tidak lain agar

pengembangan sector pariwisata dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

E. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Jika pemerintah dapat mengelola dengan baik sumber daya alam daerah menjadi sektor pariwisata daerah yang memberikan kontribusi kepada daerah maka dapat juga berguna sebagai penunjang pembangunan disuatu daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara,¹³ Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ada beberapa sumber pendapatan daerah diantaranya:

1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang berguna untuk membiayai

³⁰ Nining Yuningsih, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2005), hlm 13.

pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,¹⁷ jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C (pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), dan pajak parkir.

2. Hasil retribusi daerah

Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 retribusi dibagi tiga golongan,¹⁸ diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

3. Hasil perusahaan milik daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk

mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya, yang disebut perusahaan daerah (Perusda). Prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien. Secara umum perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Jadi, tergambar dua fungsi pokok yaitu sebagai dinamisor perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Menurut biro pusat statistik, pendapatan terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan berupa uang

Yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan hanya diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra pretasi. Pendapatan jenis ini bersumber dari:

- a. Gaji dan upah yang diperoleh dari :
 - 1) Kerja pokok
 - 2) Kerja sampingan
 - 3) Kerja lembur
 - b. Usaha sendiri, yang meliputi:
 - 1) Laba bersih usaha
 - 2) Komisi
 - 3) Penjualan hasil home industry
 - c. Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah
 - d. Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.
2. Pendapatan berupa barang

Yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dalam bentuk barang atau jasa. Akan tetapi berupa :

- a. Pengobatan
 - b. Beras
 - c. Transportasi
 - d. Perumahan
 - e. Gratis sewa rumah
3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, berupa :

- a. Pengambilan tabungan/deposito
- b. Hasil penjualan barang-barang pribadi

F. Pendapatan dalam Islam

Sumber penerimaan pada masa Rasulullah Saw, dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu : ³¹

1. Kaum Muslim

Penerimaan dari kaum muslim adalah *kharaj* (pajak tanah), zakat, *ushr* (bea impor), zakat fitrah, wakaf, infak dan shadaqah, *amwal fadhal* (harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya), *nawib* (pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebani kaum muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, ini pernah terjadi pada saat perang tabuk), *khumus atas rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum islam

2. Pendapatan Kaum Non-Muslim

Pendapatan kaum non-muslim, yakni *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr*.

3. Sumber penerimaan yang lain.

Sumber penerimaan yang lain, yakni *ghanimah* (harta rampasan perang), *fay* (harta dari daerah taklukan), uang tebusan untuk para tawanan perang, *kaffarah* atau denda, hadiah, dan pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim.

³¹ Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia", Jurnal Pemikiran Islam, Volume 19, No. 2, 2018.

Distribusi pendapatan menurut ahli ekonomi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa, dari produsen (penghasil) ketangan konsumen (pemakai) yang membutuhkannya. Pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Dalam Islam kekayaan dan pendapatan harus didistribusikan secara merata untuk mencapai keadilan distribusi dan sosio ekonomi yang didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan. Ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.³²

Distribusi dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi *shadaqah*. *Shadaqah* disini bukan berarti sedekah dalam bahasa indonesia. Karena *shadaqah* dalam konteks terminologi Al-qur'an dapat dipahami dalam dua aspek yaitu : *shadaqah wajibah* dan *shadaqah nafilah*.

G. Penelitian Terdahulu

³² Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam", Jurnal Maqdis Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2016 Padang: IAIN Imam Bonjol Padang), 66-67

Penelitian yang dilakukan oleh Zaman³³ dengan judul “*Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau*”, yang bertujuan mendeskripsikan untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Berau oleh pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari tersedianya saran dan prasarana penunjang pariwisata yang cukup lengkap, kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yang beberapa tahun sudah berjalan dengan baik serta pembenahan di beberapa objek wisata unggulan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten Berau dalam 2 tahun sejak menjadi kabupaten (2011-2012) masing-masing sebesar Rp. 279.178.000,00 dan Rp. 290.830.000,00 dari target 300.000.000. Jumlah ini diperoleh dari retribusi tempat parkir dan olahraga serta retribusi izin usaha kepariwisataan. Kontribusi paling besar dari objek wisata terhadap total penerimaan dari objek/agro wisata dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Berau dalam kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2012 adalah dari objek wisata Derawan yang juga merupakan objek wisata budaya yaitu Rp. 65.508.000,00. Faktor penghambat dalam pengelolaan

³³ Bahru Zaman, *Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau*, *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 2, Nomor 1, 2014.

sektor pariwisata di Kabupaten Berau secara umum adalah akses menuju objek wisata kurang mendukung. Faktor pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata kabupaten Berau adalah adanya kesadaran masyarakat untuk melengkapi sarana tambahan di objek wisata dan menjaga kebersihan serta banyaknya potensi pariwisata yang ada di kabupaten Berau yang bisa dikembangkan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sedangkan penelitian yang saya tulis membahas mengenai upaya pengembangan potensi wisata. Sedangkan persamannya yaitu membahas mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selain itu metode yang digunakanpun juga sama.

Penelitian ini dilakukan oleh Purnamasari³⁴ dalam bentuk karya skripsi yang berjudul “Pengaruh Potensi Ekowisata Bahari Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pada penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa persentase pengaruh ekowisata bahari terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sebesar 39,9 % dan itu dinyatakan signifikan. Pada penelitian Selma Purnamasari memiliki suatu perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis dan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan pengolahan data yang

³⁴ Selma Purnama Sari, *Pengaruh Potensi Ekowisata Bahari Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung [Skripsi], 2017

digunakan. Selma menggunakan uji regresi linier sederhana dengan metode pengolahan data. Sedangkan penelitian yang akan ditulis akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memiliki peran pada keberadaan ekowisata yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat bertujuan untuk menguji konsep yang sudah ada, serta memperdalam kajian sebelumnya mengenai kontribusi Islam dalam aspek sosial ekonomi umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rani³⁵ dengan judul *“Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)”*, yang bertujuan mengkaji tentang Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang). Oleh karenanya, berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang terjadi di Kabupaten Sumenep, studi ini mendeskripsikan hal-hal yang menjelaskan tentang bagaimana pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut Pantai lombang yang merupakan asset pemerintah memberikan sumbangsihnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep dan otonomi daerah semakin baik tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata yang terjadi di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep secara bertahap telah mengembangkan potensi pariwisata yang ada, hal ini memberikan dampak yang cukup efektif dengan adanya peningkatan pemasukan daerah yang cukup

³⁵ Deddy Prasetya Maha Rani , “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)”, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014

tinggi di sektor pariwisata setiap tahunnya. Namun dengan meningkatnya pemasukan daerah ini masyarakat sekitar belum merasakan hasil yang besar dari pengembangan pariwisata yang ada di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya menyediakan infrastruktur yang memadai. Yang membedakan penelitian yang ditulis oleh Deddy Prasetya Maha Rani ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu pembahasan dalam penelitian yang ditulis oleh Deddy Prasetya Maha Rani ini membahas mengenai pengembangan potensi wisata sedangkan penelitian yang saya tulis membahas mengenai pengembangan fasilitas wisata. Sedangkan persamannya yaitu membahas mengenai pengembangan wisata, selain itu metode yang digunakanpun juga sama.

Penelitian ini dilkuaqn oleh Rina³⁶ dalam bentuk karya jurnal yang berjudul “Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial, dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan Sukami”. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini memberikan kesimpulan bahwa program ekowisata berbasis masyarakat memberikan perubahan dengan pengaruh yang positif bagi masyarakat terutama pada aspek ekologi, sosial dan ekonomi khususnya di Kampung Batu suhunan. Selain lokasi penelitiannya yang berbeda, perbedaan lain yang dilakukan oleh Emma dan Rina adalah metode penelitian yang digunakan. Selain itu, data kuantitatif yang didapat dan kemudian diolah menggunakan program micosoft excel sedangkan pada

³⁶ Hijriati, Emma dan Mardiana Rina, “*Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial, dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan*”, Jurnal Sosiologi Pedesaan.Vol.2 (3), 2014

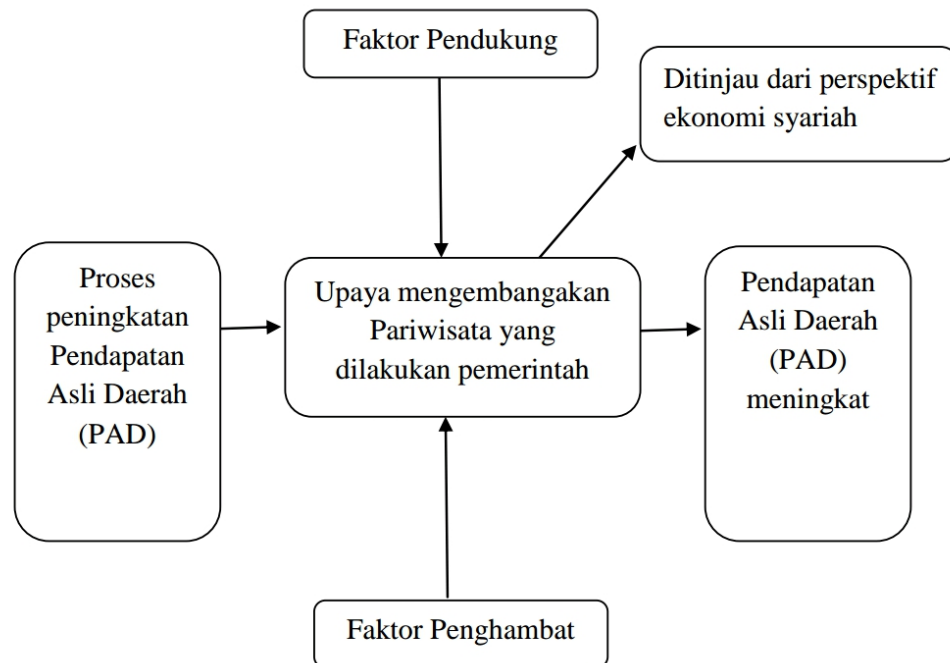
penelitian yang akan ditulis data kualitatif yaitu data sekunder dan primer. Kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap keberadaan ekowisata yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat bertujuan untuk menguji konsep yang sudah ada.

Penelitian Nining Yuningsih³⁷ dengan judul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan pengembangan di pantai pangandaran dengan tujuan menarik minat wisatawan yang berkunjung, dalam setiap tahunnya pendapatan dari pantai pangandaran selalu mengalami peningkatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu pembahasan dalam penelitian ini membahas peran pariwisata secara umum, sedangkan penelitian yang saya tulis membahas mengenai upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata secara umum dan ditinjau perspektif ekonomi syariah. Sedangkan persamannya yaitu membahas mengenai faktor yang mendorong dan menghambat industri pariwisata.

³⁷ Nining Yuningsih, Skripsi “ *peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi objek wisata pantai pangandaran di kabupaten Ciamis jawa barat*”, (Semarang: universitas negeri semarang, 2005).

H. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata.

Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu

cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengembangkan potensi obyek wisata.